Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 3 Nomor 2, Desember 2023
Halaman 81 - 94
e-ISSN 2798-4605

Pengenalan Kebijakan Moneter Dalam Memelihara Kestabilan Nilai Tukar Rupiah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

Santi Arafah, Universitas Potensi Utama

Abstract

Islamic monetary policy is an attempt to control macroeconomic conditions so that they can run as desired by regulating the amount of money circulating in the economy. The goal of Islamic monetary policy is to maintain currency stability (both internally and externally) so that the expected equitable economic growth can be achieved. Stability in the value of money is inseparable from the goal of sincerity and openness in dealing with humans. Monetary policy instruments in Islam reserve ratio in the form of a certain percentage of bank savings that must be held by the central bank, moral suasion, namely the central bank can persuade banks to increase demand for credit as their responsibility when the economy is in a state of depression, lending ratio which means qardhul hasan (good loans), refinance ratio in the form of a proportion of interest-free loans, profit sharing ratio (profit sharing ratio) must be determined before starting a business, Islamic sukuk, and government investment certificates in the form of selling or buying central bank certificates in a commercial framework.

Keywords: Monetary Policy, Rupiah Exchange Rate Stability, Islamic Economics.

Abstrak

Kebijakan moneter Islam merupakan suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Tujuan kebijakan moneter Islam yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal) sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Instrumen kebijakan moneter dalam Islam reserve ratio berupa persentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral, moral suasion yaitu bank sentral dapa membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi, lending ratio yang berarti qardhul hasan (pinjaman kebaikan), refinance ratio berupa sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga, profit sharing ratio (ratio bagi keuntungan) harus ditentukan sebelum memulai bisnis, Islamic sukuk, dan government investment certificate berupa penjualan atau pembelian sertifikat bank sentral dalam kerangka komersial.

Kata Kunci: Kebijakan Moneter, Kestabilan Nilai Tukar Rupiah, Ekonomi Islam.

Email : santiarafah@gmail.com

PENDAHULUAN

Kebijakan moneter Islam adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara. Biasanya otoritas moneter dipegang oleh Bank Sentral suatu negara sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Dengan kata lain, kebijakan moneter Islam merupakan suatu usaha dalam mengarahkan pada kondisi ekonomi makro yang bertujuan agar sesuatu yang diharapkan agar tercapai dengan baik melalui pengaturan dan penstabilan jumlah uang yang beredar pada perekonomian. Sasaran yang diharapkan ialah untuk menjaga kestabilan nilai uang yang baik terhadap faktor eksternal. Stabilitas pada nilai uang menunjukkan bahwa stabilitas harga yang dapat memberikan pengaruh pada realisasi pencapaian suatu tujuan dalam pembagunan untuk suatu negara, seperti memenuhi kebutuhan yang mendasar, perluasan pada kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang riil optimum serta stabilitas

 e-ISSN 2798-4605

ekonomi.(Marzuki, 2021)

Secara harfiah, tujuan dari kebijakan moneter secara Islam tidak berbeda jauh dengan tujuan kebijakan moneter secara konvensional yaitu dalam memelihara stabilitas suatu nilai mata uang baik secara internal ataupun eksternal yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat terwujud. Stabilitas akan nilai mata uang ini tidak terlepas pada tujuan dari transparansi (keterbukaan) dan ketulusan dalam berhubungan dengan manusia.(Latifah, 2015). Dengan kata lain, Tujuan dari kebijakan moneter Islam ialah menjaga kestabilan ekonomi berupa pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia, menjaga kestabilan harga yaitu harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar, meningkatkan kesempatan kerja dan memperbaiki neraca perdaganagn kerja masyarakat.(Rahmawaty, 2013)

Tujuan dari kebijakan moneter yang diadakan oleh Bank Indonesia (BI) ialah demi menjangkau kestabilitasan nilai rupiah, melindungi stabilitas sistem pembayaran, dan memelihara stabilitas sistem keuangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinabungan sebagaimana yang telah ditetapkan pada pasal 7 UU No.23 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia, dimana pasal tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dimaksudkan "Stabilitas Nilai Rupiah" adalah kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar Rupiah. (Astuti & Hastuti, 2020)

Stabilitas nilai rupiah didasarkan pada kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar Rupiah. Kestabilan harga barang dan jasa dicapai melalui inflasi yang rendah dan stabil. Sedangkan, kestabilan dari suatu nilai tukar rupiah ditentukan melalui kestabilan nilai rupiah kepada mata uang negara lain. Kestabilan nilai tukar rupiah dimaksudkan jika nilai inflasi rendah dan stabil. Kestabilan nilai tukar rupiah berperan penting demi tercapainya perkembangan ekonomi yang berkesinabungan. Kestabilan nilai tukar rupiah sangat dibutuhkan dan tidak terpisahkan dari upaya dalam mendukung terwujudnya inflasi yang rendah dan stabil. Demi pencapaian tujuan tersebut, maka Bank Indonesia mengadakan kerangka kebijakan moneter tersebut dinamai *Inflation Targeting Framework* (ITF) sejak 1 Juli 2005. Kerangka yang diadakan oleh Bank Indonesia tersebut menjadi target yang difokuskan (*overriding objective*). Bank Indonesia secara berkelanjutan melaksanakan penyempurnaan pada kebijakan moneter untuk memperkuat efektivitasnya. Hal ini dilaksanakan agar Bank Indonesia mampu menangani dinamika dan tantangan perekonomian yang terus berubah. Bank Indonesia merupakan lembaga yang mengatur kebijakan moneter di Indonesia, Dimana, Bank Indonesia memiliki peran penting demi melindungi kestabilitasan nilai Rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinabungan.(Warjiyo, 2017)

Disamping itu, agar terwujudnya tujuan dari kebijakan moneter yaitu melindungi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dimana, salah satunya melalui tingkat inflasi yang rendah dan stabil demi mencapai tujuan tersebut. Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI-7 *Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebagai instrumen utama yang digunakan untuk mempengaruhi aktivitas pada perekonomian dengan tujuan akhir demi mewujudkan target inflasi.

Sehingga, proses transmisi kebijakan moneter tersebut dilalui dengan waktu yang diperlukan demi mewujudkan target inflasi melalui beberapa *channel* dan membutuhkan waktu (*time lag*).

Semua chanel transmisi kebijakan moneter memiliki time lag yang berbeda-beda.

Copyright © 2023, Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Berikut ini struktur dari transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia.(Warjiyo, 2017)

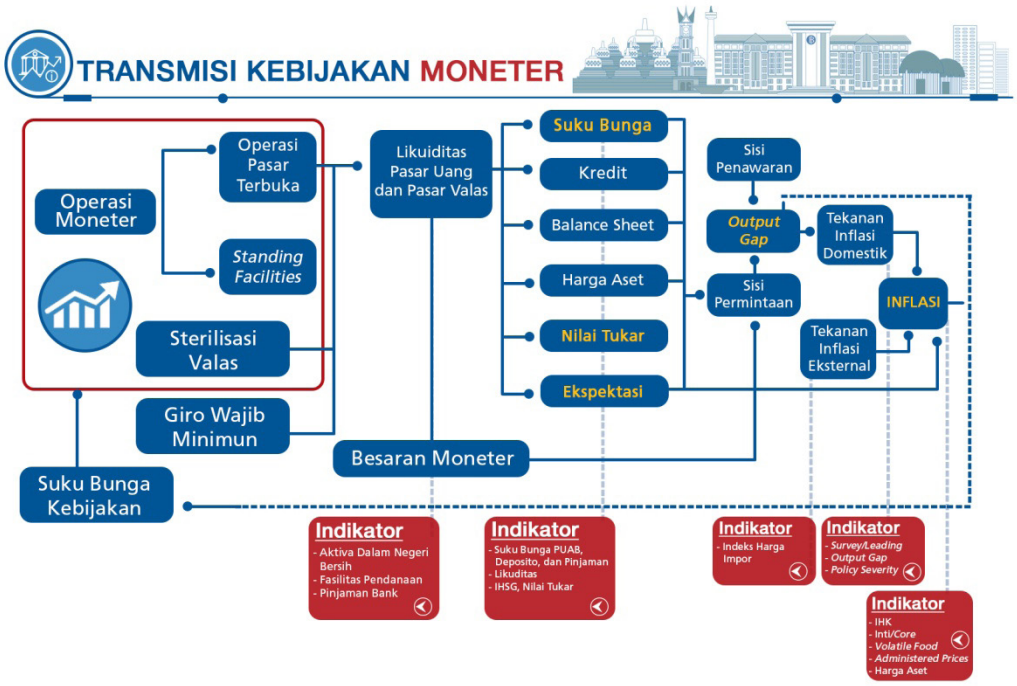

Gambar 1. Transmisi Kebijakan Moneter Bank Indonesia

Kondisi normal, perbankan akan menanggapi kenaikan atau penurunan BI-7 *Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga perbankan. Namun, bila perbankan memandang risiko perekonomian cukup tinggi, sehingga menyebabkan respons dari perbankan terhadap penurunan suku bunga BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) akan menjadi lebih lambat. Sebaliknya, jika perbankan sedang melaksanakan konsolidasi dalam memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan peningkatan permintaan kredit tidak selalu direspons dengan menaikkan penyaluran kredit. Di sisi permintaan, penurunan suku bunga kredit perbankan juga tidak selalu direspons oleh meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat maka prospek perekonomian sedang lesu. Efektivitas transmisi kebijakan moneter dipengaruhi oleh kondisi eksternal, sektor keuangan dan perbankan, serta sektor riil.(Astuti & Hastuti, 2020)

Transmisi kebijakan moneter di jalur suku bunga, perubahan BI 7DRR 7DRR dapat memengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Bank Indonesia dapat menjalankan kebijakan moneter dengan ketat melalui kenaikkan suku bunga yang berakibat pada permintaan agregat sehingga mampu menurunkan tekanan inflasi. Sebaliknya, penurunan BI 7DRR dapat menurunkan suku bunga kredit sehingga meniaikkan permintaan kredit dari perusahaan dan rumah tangga. Penurunan suku bunga kredit juga dapat menurunkan biaya modal perusahaan untuk investasi. Hal inilah yang dapat meningkatkan aktivitas konsumsi dan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.(Sugianto, 2015)

Transmisi kebijakan pada jalur nilai tukar melalui perubahan suku bunga BI 7DRR akan mempengaruhi nilai tukar. Jika BI 7DRR naik, maka dapat meningkatkan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga di luar negeri. Hal inilah yang menggerakkan investor asing dalam menanamkan modalnya ke instrumen keuangan di Indonesia, karena mereka bisa memeperoleh suatu tingkat pengembalian yang lebih

Copyright © 2023, Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/dinamis

 e-ISSN 2798-4605

tinggi. Aliran modal asing tersebut dapat menggerakkan apresiasi nilai tukar rupiah. Apresiasi nilai tukar rupiah menjadikan harga barang impor lebih murah, sedangkan harga barang ekspor menjadi lebih mahal atau kurang kompetitif, maka hal inilah mampu menggerakkan impor dan mengurangi ekspor. Adanya apresiasi rupiah dapat berakibat akan penurunan tekanan inflasi.(Sugianto, 2015)

Perubahan suku bunga BI 7DRR dapat mendorong perekonomian makro melalui perubahan harga aset. Kenaikan suku bunga dapat juga menurunkan harga aset seperti saham dan obligasi, sehingga dapat mengurangi kekayaan pada individu dan perusahaan yang dapat mengurangi kemampuan mereka dalam melaksanakan aktivitas ekonomi seperti konsumsi dan investasi. Hal inilah mampu mengurangi permintaan agregat sehingga menyebabkan penurunan tekanan inflasi. Dampak pada perubahan suku bunga atas aktivitas ekonomi juga mendorong ekspektasi publik pada inflasi (jalur ekspektasi). Penurunan suku bunga akan mempengaruhi aktivitas ekonomi yang akhirnya inflasi akan mempengaruhi pekerja untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dengan meminta upah yang lebih tinggi. Upah ini akhirnya akan ditanggung oleh produsen untuk konsumen melalui kenaikan harga.(Warjiyo, 2017)

Adapun instrument kebijakan moneter secara umum, antara lain;(Mansur, 2013)

1. Kebijakan diskonto (*discount rate*) ialah instrumen dari kebijakan moneter yang telah diukur melalui suatu tingkat suku bunga bank. Kondisi dimana bank-bank umum meminjamkan dananya kepada Bank Indonesia selaku bank sentral menjadikan peredaran jumlah uang teratur. Ketika peredaran uang dapat ditingkatkan, maka Bank Indonesia dapat menurunkan suku bunga pinjaman. Sebaliknya, suku bunga kredit bank dapat dinaikkan ketika peredaran uang mampu dikurangi.
2. Operasi pasar terbuka ialah instrumen kebijakan moneter yang dilakukan saat pemerintah mengendalikan peredaran uang melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga milik pemerintah. Saat Bank Indonesia ingin mengurangi peredaran uang, maka pemerintah dapat menjual surat berharga. Sebaliknya, ketika peredaran uang dapat ditingkatkan, maka pemerintah membeli surat berharga.
3. Kebijakan rasio cadangan wajib ialah instrumen kebijakan moneter berupa rasio cadangan wajib. Saat Bank Indonesia ingin mengurangi cadangan kas uang bank, maka uang yang dapat diedarkan di masyarakat melalui suatu pinjaman. Sedangkan, jika cadangan kas uang bank dapat ditambah, uang yang beredar di masyarakat mampu ditarik dengan peningkatan suku bunga pada tabungan.
4. Penetapan Suku Bunga Acuan ialah instrumen kebijakan moneter yang berfokus pada pencapaian tujuan kebijakan moneter, sehingga bank Indonesia mempunyai kewenangan dalam mengontrol suatu peredaran uang berdasarkan suku bunga. Besaran suku bunga yang ditentukan oleh bank Indonesia akan menjadi acuan bank umum di seluruh Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya. Oleh sebab itu, instrumen kebijakan moneter adalah penentuan pada suku bunga acuan.
5. Imbauan Moral ialah instrumen dari kebijakan moneter berupa imbauan moral. Dalam hal inilah, Bank Indonesia selaku bank sentral menghimbau seluruh bank umum untuk melaksanakan kebijakan pada penurunan atau peningkatan suku bunga pinjaman

Sedangkan, Instrumen kebijakan moneter dalam Islam,antara lain;

1. *Reserve ratio* berupa persentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral.
2. Moral *suasion* yaitu bank sentral dapa membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam

Copyright © 2023, Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

keadaan depresi,

3. *Lending ratio* yang berarti *qardhul hasan* (pinjaman kebaikan),
4. *Refinance ratio* berupa sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga,
5. *Profit sharing ratio* (ratio bagi keuntungan) harus ditentukan sebelum memulai bisnis, *Islamic sukuk*, dan *government investment certificate* berupa penjualan atau pembelian sertifikat bank sentral dalam kerangka komersial.(Sobarna, 2019)

Disamping itu, jenis jenis kebijak.an moneter antara lain;(Mujiatun, 2015)

1. Kebijakan moneter ekspansif ialah kebijakan moneter yang melaksanakan pengelolaan dan pengaturan pada peredaran uang dalam kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, sasaran utamanya ialah peningkatan pada peredaran uang di masyarakat sehingga roda perekonomian meningkat. Wujud dari jenis kebijakan moneter ini melalui peningkatan pembelian sekuritas pemerintah oleh Bank Indonesia, penurunan suku bunga, menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Dampak kebijakan ini tak hanya mendorong kegiatan bisnis atau daya beli konsumen, tetapi juga dapat mengurangi pada tingkat pengangguran.
2. Kebijakan moneter kontraktif ialah kebijakan yang diambil sebagai langkah dalam mengurangi peredaran uang di masyarakat jika terjadi inflasi. Hal inilah yang diwujudkan melalui penjualan obligasi pemerintah, meningkatkan suku bunga bank, dan meningkatkan persyaratan cadangan pada bank.

Menurut Umer Chapra, mekanisme kebijakan moneter harus selaras dengan prinsip syariah yang memiliki enam elemen antara lain; adanya target dalam pertumbuhan M dan Mo.

Dimana, setiap tahun Bank Sentral haruslah menetapkan pertumbuhan dan perkembangan dari uang (M) selaras dengan sasaran pada ekonomi Nasional. Pertumbuhan dan perkembangan M berkaitan erat dengan pertumbuhan dan perkembangan Mo (*high powered money*: uang dalam sirkulasi dan deposito pada bank sentral). Bank sentral tetap mengawasi secara ketat tentang pertumbuhan dari Mo yang dialokasikan pada pemerintah, bank komersial dan lembaga keuangan yang disesuaikan pada proporsi yang telah ditetapkan didasarkan pada keadaan ekonomi dan sasaran pada perekonomian Islam. Mo ini disediakan oleh bank-bank komersial terutama dalam bentuk mudharabah yang dapat dimanfaatkan oleh bank sentral sebagai instrument kualitatif dan kuantitatif dalam pengendalian kredit.(Syahputra, 2021)

Kedua, *public share of demand deposit* (uang giral). Dimana, jumlah tertentu dari demand deposit bank-bank komersial (maksimum 25%) harus diberikan kepada pemerintah guna untuk pembiayaan proyek-proyek sosial yang lebih menguntungkan. Ketiga, *statutory reserve requirement.* dimana, bank-bank komersil diwajibkan untuk mempunyai cadangan wajib dalam jumlah tertentu di bank sentral. *Statutory reserve requirements* bertujuan untuk membantu dengan memberikan jaminana atas dasar deposit dan juga membantu dalam menyediakan likuiditas yang memadai bagi bank. Sebaliknya, bank sentral wajib mengganti dari biaya yang telah dikeluarkan untuk memobilisasi dana yang telah dikeluarkan oleh bank-bank komersial tersebut. Keempat, *credit ceilings* (pembatasan kredit). Dimana, kebijakan dalam menetapkan suatu batas kredit yang diperbolehkan untuk dilaksanakan oleh bank-bank komersil guna memberikan suatu jaminan bahwa penciptaan kredit sesuai pada sasaran moneter dan mewujudkan kompetisi yang sehat antar suatu bank komersial.(Wahyudi, 2013)

Copyright © 2023, Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

 e-ISSN 2798-4605

Kelima, alokasi kredit didasarkan nilai. Dimana, Realisasi kredit wajib dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Alokasi kredit ditujukan dalam optimisasi produksi dan distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh sebagian besar dari masyarakat. Keuntungan yang didapatkan dari memberikan kredit juga dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, sangat diperlukan adanya suatu jaminan kredit yang telah disepakati antara pemerintah dengan bank-bank komersial dalam mengurangi suatu resiko dan biaya yang telah di tanggung bank. Dan Keenam, teknik Lain yaitu teknik kualitatif dan kuantitatif tersebut harus dilengkapi pada senjata-senjata lain dalam merealisasikan target yang dibutuhkan termasuk diantaranya ialah moral suasion atau himbauan moral.(Rasti, 2022)

Mazhab dalam kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, yaitu; Pertama, *Mazhab Iqtishaduna*. Dimana, di awal masa Islam tidak dibutuhkan suatu kebijakan moneter dikarenakan sistem perbankan hampir tidak ada dan pemakaian uang sangat rendah. Jadi, tidak ada alasan yang cukup untuk melaksanakan perubahan-perubahan pada penawaran suatu uang melalui diskresioner. Kredit ini tidak mempunyai peran dalam suatu penciptaan uang karena kredit hanya dapat dipergunakan antar pedagang. Disamping itu, peraturan pemerintah mengenai surat pinjaman (*promissory notes*) dan instrumen negosiasi (*negotiable instruments*) diciptakan sedemikian agar tidak ada kemungkinan dalam penciptaan uang. *Promissory notes atau bill exchange* dapat diterbitkan dalam membeli barang dan jasa atau memperoleh sejumlah dana, namun tidak dapat dipergunakan dalam tujuan kredit (Ajuna, 2017). Aturan-aturan yang dibuat tersebut dapat mempengaruhi keseimbangan antara pasar barang dengan pasar uang yang didasarkan atas transaksi tunai dalam nasi'a atau aturan transaksi lainnya, uang yang telah dibayarkan atau diterima yang bertujuan untuk memperoleh komoditas atau jasa. Instrumen lain yang ada saat ini dipergunakan dalam mengatur jumlah peredaran uang serta mengatur pada tingkat suku bunga jangka pendek adalah OMO (jual-beli surat berharga pemerintah) yang belum dikenal di awal pemerintahan Islam. Selain itu, praktek dalam menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bertentangan dengan pada ajaran Islam yang telah melarang praktek riba. (Siregar, 2021)

Kedua, Mazhab *Mainstream*. Dimana, kebijakan moneter pemerintah bertujuan dalam memaksimalkan suatu sumber daya yang ada guna bisa dialokasikan pada kegiatan perekonomian yang produktif. Alquran juga melarang adanya tindakan penimbunan uang (*money hoarding*) karena menjadikan uang tersebut tidak dapat memperoleh manfaat pada peningkatan suatu kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, mazhab ini dihadirkan pada sebuah instrument kebijakan yang diarahkan guna mempengaruhi besar kecilnya akan permintaan uang (M^D) guna dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Permintaan dalam Islam dibagi pada 2 motif, antara lain; motif transaksi (*transaction motive*) dan motif berjaga-jaga (*precautionary motive*). Semakin banyak uang yang menganggur (*iddle*) berarti permintaan berjaga-jaga (M^D_{prec}) akan semakin banyak pula, sedangkan semakin tinggi pajak yang dikenakan pada uang yang menganggur berbanding terbalik pada permintaan akan uang dalam berjaga-jaga. *Dues of idle fund* adalah instrument dari kebijakan yang dikenakan pada setiap aset produktif yang telah menganggur. Hal ini berpengaruh besar atau kecilnya dari permintaan suatu uang guna dialokasikan pada peningkatan produktifitas perekonomian secara menyeluruh. (Mansur, 2013)

Ketiga, Mazhab Alternatif. Dimana, kebijakan moneter melalui "*syuratiq process*", dimana suatu kebijakan yang diperoleh dari otoritas moneter yang didasarkan pada musyawarah yang dilakukan sebelumnya dengan otoritas sektor riil. Sehingga terjadi

Copyright © 2023, Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

suatu harmonisasi antara kebijakan moneter dengan sektor riil. Menurut pemikiran mazhab ini, kebijakan moneter adalah *repeated games in game theory* (Aulya, 2022). Dimaksudkan dalam hal ini, bentuk kurva penawaran dan permintaan akan uang mirip tambang yang melilit dengan kemiringan (*slope*) positif akibat *knowledge induced process and informant sharing* yang baik.(Sugiatni, 2022)

Beberapa contoh Kebijakan Moneter di Indonesia, yaitu:(Sobarna, 2019)

1. Pelaksanaan Kredit Langsung oleh Bank Indonesia
   Bank Indonesia menghadirkan kredit langsung. Pemberian kredit langsung diserahkan kepada berbagai sektor atau proyek yang membutuhkan pemasokan dana secara mendesak. Hal ini mampu menaikkan jumlah uang yang beredar disebabkan adanya yang membiayai aktivitas dengan segera.
2. Penyediaan Fasilitas *Overdraft*
   Bank Indonesia menolong bank umum yang mengalami suatu kesulitan pada likuiditas jangka pendeknya. Bantuan tersebut yang diperoleh berupa pinjaman jangka pendek dengan penggunaan suku bunga yang tinggi. Hal inilah yang dapat mengendalikan peredaran uang agar dapat tetap stabil.
3. Penerbitan Surat Utang Negeri
   Menerbitkan surat utang negara. Dalam hal inilah, pemerintah berusaha untuk mengadakan penghimpunan dana pada masyarakat guna uang yang beredar di masyarakat dapat mengalami penurunan.
4. Program Intervensi Rupiah
   Program intervensi rupiah. Dimana, Bank Indonesia melakukan proses pinjam meminjam dana secara langsung di Pasar Uang Antar Bank dalam periode 7 hari. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung instrumen kegiatan operasi pasar terbuka.

Dengan demikian, Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan dalam mencapai suatu keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya suatu tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang digunakan untuk diukur pada kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Jika kestabilan dalam suatu kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipergunakan dalam memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter akan berdampak pada sektor perbankan dan selanjutnya akan berdampak pada sektor riil.(Fuad, 2020) Hal inilah yang menyebabkan perlunya pengenalan kebijakan moneter yang ditinjau dalam Perspektif ekonomi Islam khususnya pada siswa/i SMK Budi Agung Medan, guna memahami sistem kebijakan moneter dalam memelihara kestabilan nilai rupiah.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian ini berupa metode pengajaran dilakukan di dalam ruangan guru dengan menggunakan slide dan presentasi. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan ± 3 bulan dimulai dari 01 Februari 2020 sampai 04 Juni 2020 dengan dihadiri oleh para SMK Budi Agung Medan.(Arafah, 2022) Kegiatan pengadian ini berupa penyampaian materi pokok mengenai kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu:

Copyright © 2023, Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

 e-ISSN 2798-4605

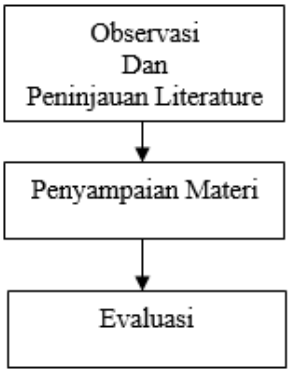

Gambar 2. Skema Tahapan Kegiatan Dalam Pengabdian Di SMK Budi Agung Medan

Adapun tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat di SMK Budi Agung Medan, antara lain:(Arafah et al., 2022)

1. Tahapan pertama berupa pra kegiatan yaitu observasi langsung ke lokasi SMK Budi Agung Medan, untuk melakukan peninjauan lokasi sekolah. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah dan peninjauan *literature*.
2. Tahapan kedua yaitu inti dari kegiatan pengabdian ini berupa pelaksanaan kegiatan utama dengan melakukan penyampaian materi melalui slide persentase dan tahapan ketiga ialah pasca kegiatan yang dilakukan dengan mengevaluasi pemahaman para siswa/i SMK Budi Agung Medan dalam memahami kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam, guna memelihara kestabilan nilai rupiah.
3. Tahapan ketiga yaitu evaluasi. Tahapan ini berupa laporan dari hasil pengabdian masyarakat di SMK Budi Agung Medan mengenai pengenalan kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam, guna memelihara kestabilan nilai rupiah

HASIL DAN DAMPAK PELAKSANAAN

Hasil kegiatan

Kegiatan pelaksanaan pengadian masyarakat di SMK Budi Agung Medan di mulai dengan penyampaian materi dasar berupa defenisi kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam, tujuan kebijakan moneter Islam, instrument kebijakan moneter Islam, mekanisme kebijakan moneter syariah dan mazhab yang digunakan dalam kebijakan moneter dalam syariah. Berikut ini gambar yang menunjukan proses penyampaian materi di SMK Budi Agung Bandar Setia.

Gambar 3. Proses Penyampaian Materi di SMK Budi Agung Medan

Copyright © 2023, Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Setelah dilaksanakannya penyampaian materi dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para siswa/i SMK Budi Agung Menda, selanjutnya dilaksanakannya tahapan evaluasi. Evaluasi ini merupakan proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan intruksional dicapai seseorang yang bertujuan dalam memberikan hasil yang berguna untuk perencanaan lanjutan dengan memperbaiki kekurangan kendala, baik dalam proses administrasi maupun manajemen. Pada kegiatan evaluasi ini para guru diarahkan dan dipastikan sudah memahami materi yang disampaikan berupa pemahaman mengenai pengenalan kebijakan moneter dalam memelihara kestabilan nilai rupiah yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam khususnya oleh para siswa/i SMK Budi Agung Medan.

Dampak Pelaksanaan

Kebijakan moneter Islam ini bertujuan untuk mengupayakan tingkat pertumbuhan suatu ekonomi yang tinggi yang secara berkesinabungan dengan tetap mempertahankan pada kestabilan harga. Untuk mencapai suatu tujuan tersebut, Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha memberikan aturan keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi bisa dikendalikan, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pemasokan/distribusi barang. Kebijakan moneter yang dilaksanakan antara lain dengan salah satu tetapi tidak terbatas akan instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir.(Mujiatun, 2015) Dalam hal ini, untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman peserta didik khususnya siswa/i SMK Budi Agung Medan mengenai topik yang akan disajikan oleh pemateri maka dilakukan penyebaran kuesioner terlebih dahulu, guna memastikan pemahaman peserta didik mengenai topik yang akan dijelaskan. Hasil yang diperoleh dari penyebaran kuesioner, sebagai berikut:

Tabel 1. Pertanyaan dan Persentase Jawaban Siswa/I XII SMK Budi Agung Medan

No	Pertanyaan	Ya		Tidak	
		Responden	Persentase (%)	Responden	Persentase (%)
1	Apakah anda mengetahui mengenai kebijakan moneter	7	28%	18	72%
2	Apakah anda mengetahui mengenai kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam	5	20%	20	80%
3	Apakah anda mengetahui mengenai tujuan dari kbijakan moneter Islam	1	4%	24	96%
4	Apakah anda mengetahui perbedaan tentang kebijakan moneter konvensional dengan kebijakan moneter Islam	3	12%	22	88%
5	Apakah anda mengetahui mengenai mekanisme dalam kebijakan moneter Islam	2	8%	23	92%
6	Apakah anda mengetahui mengenai mazhab yang digunakan dalam kebijakan moneter Islam	0	0%	25	100%

Copyright © 2023, Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

 e-ISSN 2798-4605

Dari tabel. 1 di atas terlihat bahwa pemahaman siswa/i khususnya XII Budi Agung Medan belum memahami sepenuhnya tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam dalam memelihara kestabilan nilai rupiah. Hal ini terlihat dari pertanyaan diajukan sebelum materi mengenai kebijakan moneter dalam perspektif Islam dimulai oleh pemateri. Adapun butir pertanyaannya. Pertanyaan 1 (Apakah anda mengetahui mengenai kebijakan moneter), siswa/i yang menjawab Ya sekitar 7 atau 28%, sedangkan yang menjawab Tidak sekitar 18 siswa/i atau 72%. Pertanyaan 2 (Apakah anda mengetahui mengenai kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam), siswa/i yang menjawab Ya sekitar 5 atau 20%, sedangkan yang menjawab Tidak sekitar 20 siswa/i atau 80%. Pertanyaan 3 (Apakah anda mengetahui mengenai tujuan dari kbijakan moneter Islam), siswa/i yang menjawab Ya sekitar 1 atau 4%, sedangkan yang menjawab Tidak sekitar 24 siswa/i atau 96%. Pertanyaan 4 (Apakah anda mengetahui perbedaan tentang kebijakan moneter konvensional dengan kebijakan moneter Islam), siswa/i yang menjawab Ya sekitar 3 atau 12%, sedangkan yang menjawab Tidak sekitar 22 siswa/i atau 88%. Pertanyaan 5 (Apakah anda mengetahui mengenai mekanisme dalam kebijakan moneter Islam), siswa/i yang menjawab Ya sekitar 2 atau 8%, sedangkan yang menjawab Tidak sekitar 23 siswa/i atau 92%. Dan pertanyaan 5 (Apakah anda mengetahui mengenai mazhab yang digunakan dalam kebijakan moneter Islam), siswa/i yang menjawab Ya sekitar 0 atau 0%, sedangkan yang menjawab Tidak sekitar 25 siswa/i atau 100%.

Selanjutnya, dilakukan juga penyebaran kuesioner pre test 10 pertanyaan dengan soal pilihan berganda dan setelah materi yang disampaikan oleh pemateri telah terlaksana dengan baik dan lancar. Maka dilakukan pembagian kuesioner kembali berupa post test melalui 10 pertanyaan yang sama dengan pre test.(Juliana, 2018) Hal ini dilaksanakan untuk mengetahui peningkatan siswa/i dalam menyimak dan memahami mengenai materi yang dibahas yaitu kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Adapun hasil yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan pada saat pre test sebelum pengabdian masyarakat dimulai dengan post test setelah pengabdian masyarakat selesai, sebagai berikut:

Tabel 2. Jawaban Pre-Test dan Post-Test Siswa/I XII SMK Budi Agung Medan

No	Nama siswa	Pre-test	Post-test
1	Indah Sari	30	80
2	Mesis Boriyanti	33	78
3	Irfan Hamonangan	20	82
4	Dimas Prayoga	15	81
5	Devi Yuliana Putri	10	79
6	Ayu Wulandari	5	77
7	Sri Mulyani	10	88
8	Sri Ulina Pinem	17	86
9	Aulia Syafitri	22	83
10	Susanti	20	75
11	Meilana Br Ginting	28	79
12	Suvina Aryati	30	77
13	Mesya Wahidah Mardiyanti	31	73
14	Yolanda Mirella	23	78
15	Shofia Lestari	27	80

Copyright © 2023, Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

16	Della Safitri	29	84
17	Yasny Ellyza	14	84
18	Risty Shabyna	13	83
19	Aulia Ramadhani	16	73
20	Riska Apriliani	10	72
21	Syahsya Bila Hasibuan	17	81
22	Dinda Riliana	19	82
23	Eka Putri Rahmadana	22	84
24	Putri Muhariza Effendi	24	87
25	Nur Ningsih	28	88
Jumlah		513	2014
Nilai Rata-Rata		20,52	80,56

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan yang cukup signifikan dari pemahaman siswa/i mengenai kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam berdasarkan hasil belajar pre-test dan post-test. Dimana pada saat melakukan pre-test pada 10 soal dengan jawaban benar menghasilkan jumlah keseluruhan siswa sekitar 513 dengan rata-rata nilai 20,52, dimana nilai minimumnya sekitar 5 dan nilai maksimumnya 33. Sedangkan pada saat melakukan post test dengan 10 soal yang sama dengan jawaban benar menghasilkan jumlah keseluruhan siswa sekitar 2014 dengan nilai rata-rata 20,52, dimana nilai minimumnya sekitar 72 dan nilai maksimum sekitar 88. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

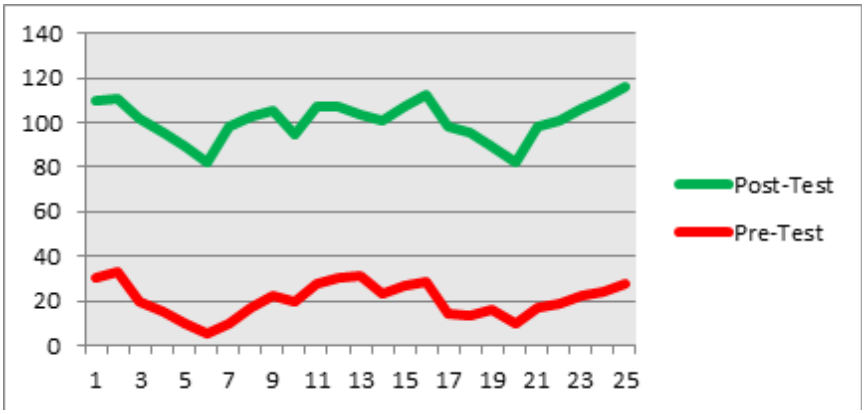

Gambar 4. Grafik Pre-Test dan Post-Test Siswa/I SMK Budi Agung Medan

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa tingkat pemahaman siswa/i di SMK Budi Agung Medan mengalami peningkatan pemahaman yang cukup signifikan mengenai pengenalan terhadap kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam dalam memelihara kestabilan nilai rupiah. Adapun tingkatan interval predikat dari penilaian skor berdasarkan jawaban yang diberikan oleh siswa/i SMK Budi Agung Medan yaitu:

Tabel 3: Interval Predikat

No	Interval Predikat	Keterangan
1	88-100	Sangat Baik
2	74-87	Baik
3	60-73	Cukup
4	< 60	Kurang

Copyright © 2023, Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

 e-ISSN 2798-4605

Dari hasil yang diperoleh berdasarkan pre-test dan post-test, maka nilai rata-rata yang diperoleh dari pre-test pada keseluruhan siswa/i XII SMK Budi Agung Medan ialah nilai 20,52 yang dikategorikan kurang memahami mengenai kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam dalam memelihara kestabilan nilai rupiah sedangkan setelah melakukan penjabaran mengenai kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam dalam memelihara kestabilan nilai rupiah diperoleh nilai rata-rata dari keseluruhan siswa/i XII SMK Budi Agung Medan sekitar 80,56 yang dikategorikan Baik.

Disamping itu, pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini terdapat beberapa faktor yang mendorong terlaksanakannya kegiatan ini diantaranya ialah terdapat peranan dan dukungan oleh pihak Sekolah SMK Budi Agung Medan demi terwujudnya kegiatan pengabdian ini. Dan juga, tingginya antusias dari para peserta yaitu siswa SMK Budi Agung Medan dalam mengikuti kegiatan yang berlangsung, sehingga kegiatan ini bisa berjalan secara efektif dan efesien. Sedangkan, kendala dalam pengabdian masyarakat ini ialah keterbatasannya waktu yang disediakan oleh pihak sekolah SMK Budi Agung Medan pada program pengabdian masyarakat ini sehingga materi yang disampaikan disesuaikan dengan waktu yang telah disediakan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di SMK Budi Agung Medan berjalan dengan baik dan lancar. Pengenalan kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam dalam memelihara kestabilan nilai rupiah terutama pada siswa/i SMK Budi Agung Medan berhasil dipahami oleh siswa/i SMK Budi Agung Medan. Dimana, Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan dalam mencapai suatu keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya suatu tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang digunakan untuk diukur pada kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Jika kestabilan dalam suatu kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipergunakan dalam memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter akan berdampak pada sektor perbankan dan selanjutnya akan berdampak pada sektor riil. Mengingat tingginya kebermanfaatan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, maka selanjutnya perlu mengadakan pelatihan berupa penjelasan serupa dengan jangkauan yang lebih luas agar lebih memahami akan pentingnya pengetahuan mengenai kebijakan moneter yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam dalam memelihara kestabilan nilai rupiah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dapat terlaksana dengan maksimal dan lancar karena adanya dukungan dan kerjasama yang baik dari beberapa pihak yang turut membantu dalam terlaksananya kegiatan abdimas ini sehingga team pengabdian masyarakat ini mengucapkan terima kasih kepada; pertama, pihak LPPM Universitas Potensi Utama selaku yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, kedua, pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Khususnya Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Ka. Prodi Ekonomi Syariah yang telah memberikan dukungannya pada pengabdian masyarakat ini dan ketiga, pihak sekolah SMK Budi Agung Medan yang telah memberikan izin dalam menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat ini, sehingga kegiatan abdimas ini dapat berjalan lancar dan maksimal.

Copyright © 2023, Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Ajuna, L. H. (2017). Kebijakan Moneter Syariah. *Al-Buhuts*, *13*(01), 104–117.

Arafah, S. (2022). Pengenalan Konsep Saham Syariah Dalam Menggerakkan Investasi Syariah Pada SMK Budi Agung Medan. *Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(1), 23–30.

Arafah, S., Miko, J., & Syafitri, E. (2022). Implementasi Personal Branding Dalam Meningkatkan Kredibilitas Jiwa Entrepreneurship Di Era Digital. *DINAMIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(2), 119–123.

Astuti, R. D., & Hastuti, S. R. B. (2020). Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi-Qu*, *10*(1), 1–22.

Aulya, W. (2022). *Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Islam*.

Fuad, A. (2020). Kebijakan Moneter Islam. *Jurnal Syariah*, *8*(1).

Juliana, J. (2018). *Pembelajaran Dan Penerapan Metode SQ3R Dalam Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Siswa*.

Latifah, N. A. (2015). Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, *11*(2), 124–134.

Mansur, A. (2013). Kebijakan Moneter dan Implikasinya terhadap Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Tsaqafah*, *9*(1), 57–74.

Marzuki, S. N. (2021). Konsep Uang Dan Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, *12*(2), 201–216.

Mujiatun, S. (2015). Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Islam. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, *14*(1).

Rahmawaty, A. (2013). Uang dan Kebijakan Moneter dalam perspektif ekonomi islam. *Jurnal Equilibrium*, *1*(2), 181–199.

Rasti, A. (2022). *Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Islam*.

Siregar, E. Y. (2021). Kerangka Kerja Kebijakan Moneter Dalam Islam. *Jurnal Al-Iqtishad*, *17*(2), 163–175.

Sobarna, N. (2019). Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Co Management*, *1*(1), 175–182.

Sugianto, S. (2015). Mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia melalui sistem moneter syariah. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *2*(1), 50–74.

Sugiatni, E. (2022). *Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.

Syahputra, R. D. (2021). *Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.

Copyright © 2023, Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

 e-ISSN 2798-4605

Wahyudi, A. (2013). Kebijakan Moneter berbasis prinsip-prinsip islam. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, *10*(1).

Warjiyo, P. (2017). *Mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia* (Vol. 11). Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.

Copyright © 2023, Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/dinamis